MODERASI BERAGAMA: IDE, GAGASAN DAN TINDAKAN DI MASA LALU

Heri Kusuma Tarupay

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Abstrak

Moderasi beragama yang saat ini dicanangkan oleh Kementerian Agama bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Dua dari empat unsur moderasi beragama yaitu toleransi dan anti kekerasan telah dirumuskan oleh para pelaku-pelaku sejarah dari berbagai etnis di Indonesia. Pengalaman sejarah dari masa kurun niaga sampai dengan saat ini menjadi dasar bagi para tokoh-tokoh yang diulas dalam tulisan ini untuk merumuskan ide, gagasan dan cara bertindak yang ideal bagi masyarakat di Indonesia. Dengan ide, gagasan dan cara bertindak yang terutamanya untuk menghilangkan perilaku intoleransi dan kekerasan dianggap menjadi cara hidup ideal bagi masyarakat Indonesia. Tulisan ini dibangun dengan menggunakan metode eksploratif yaitu menganalisa beberapa tulisan para tokoh sejarah sejak masa kurun niaga sampai dengan tokoh terakhir sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang merumuskan cara hidup toleransi dan anti kekerasan. Lewat pemaparan pemikiran dari berbagai periode sejak masa kurun niaga sampai dengan saat ini, ditunjukkan untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia bahwa moderasi beragama telah diterapkan jauh sebelum istilah ini dipopulerkan oleh Kementerian Agama. Hidup ber(se)sama dengan rukun antar suku, agama, ras dan kelas sosial menjadi tujuan dari cara berpikir dari para pelaku sejarah tersebut.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Ide, Toleransi, Anti Kekerasan, Sejarah

Abstract

Religious moderation currently proclaimed by Ministry of Religious Affairs is nothing new in Indonesian society. Two of the four elements of religious moderation, namely tolerance and anti-violence, have been formulated by historical actors from various ethnic groups in Indonesia. Historical experience from the age of commerce to the present day has become the basis for the figures reviewed in this paper to formulate ideal ideas and ways of life for Indonesian society. With ideas and ways of life that are mainly to eliminate intolerance and violence behavior are considered to be the ideal way of life for Indonesian people. This paper was developed using an exploratory method, namely analyzing the writings of several historical figures from the age of commerce to Pramoedya Ananta Toer era, who formulated a way of life of tolerance and non-violence. Thoughts from various periods from the age of commerce to the present, it is intended to remind the Indonesian people that religious moderation has been implemented long before this term was popularized by the Ministry of Religious Affairs. Living together in harmony between tribes, religions, races and social classes is the way of thinking these historical actors.

Key Words: Religious Moderation, Idea, Tolerance, Anti-violence, History

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan satu produk ide yang lalu digagas untuk menjadi pedoman dalam bertindak. Tentu sebagai satu produk ide, gagasan dan tindakan, istilah moderasi beragama -yang lalu saat ini digaungkan oleh Kementerian Agama- tidaklah lahir dari ruang hampa. Moderasi beragama lahir dari (kekuatiran) kondisi saat ini. Umum diketahui, bahwa dalam kondisi saat sekarang ini, kondisi kehidupan beragama masyarakat Indonesia terancam oleh berbagai isu dan tindakan radikal. Tidak hanya itu, beberapa bukti menunjukkan bahwa penganut agama minoritas di Indonesia diancam oleh oknum-oknum kelompok mayoritas. Tidak jarang diberitakan adanya pelarangan pendirian rumah ibadah, pelarangan ibadah agama tertentu, pengeboman terhadap rumah ibadah, pemaksaan penggunaan pakaian agama tertentu terhadap penganut agama lain dan lain sebagainya. Pada intinya, akhirnya Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang mengatur dan menjamin kebebasan kehidupan beragama perlu untuk mengeluarkan ide untuk menyadarkan umat beragama Indonesia tentang pentingnya kebebasan beragama dan hidup ber(se)sama, yang lalu dibahasakan dalam dua dari empat unsur moderasi beragama yaitu toleransi dan

anti kekerasan. Dua unsur lainnya adalah komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dua unsur yaitu toleransi dan anti kekerasan akan dirangkum dalam istilah hidup ber(se)sama dalam tulisan selanjutnya. Tetapi, bukankah pengalaman masa lalu masyarakat Indonesia telah begitu kaya dengan keberagaman? Tampaknya, masyarakat Indonesia saat ini, perlu diingatkan kembali pengalaman hidup ber(se)sama yang digagas sejak masa “kurun niaga” meminjam istilah sejarawan Anthony Reid sampai dengan masa kontemporer, untuk menyadarkan agar tidak lagi saling membeda(-beda)kan berdasar pada SARA (Suku, Agama, Kelas Sosial dan Ras).

Tulisan ini pada dasarnya merupakan tulisan eksploratif yang fokusnya pada istilah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yaitu Moderasi Beragama. Didasarkan pada pemikiran bahwa dua unsur moderasi beragama yaitu toleransi dan anti kekerasan bukanlah produk ide yang tidak pernah dikenal dalam kehidupan ber(se)sama masyarakat Indonesia, maka tulisan ini mengingatkan kembali kepada para pembaca bahwa perilaku hidup seperti ini telah dipikirkan sebelumnya. Salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk membantu para pembaca mengetahui atau mengingat kembali bahwa gagasan toleransi dan anti

kekerasan sudah pernah ada yaitu menuliskan kembali gagasan-gagasan yang pernah ditulis oleh beberapa pelaku sejarah. Tulisan ini tidak mencatat semua gagasan yang pernah dikemukakan dalam berbagai bentuk berkaitan dengan toleransi dan anti kekerasan, tetapi dengan alasan ketersediaan sumber primer dan sekunder, akhirnya terdapat empat gagasan yaitu dari gagasan Kwee Thiam Tjing, Njoo Cheong Seng, Soekarno dan Pramoedya Ananta Toer. Satu lagi merupakan hasil bacaan mengenai peristiwa sejarah yang ditulis oleh sejarawan Australia Anthony Reid. Keempat sumber ini, diolah menjadi satu tulisan yang ditujukan untuk mengingatkan bahwa unsur moderasi beragama yaitu toleransi dan anti kekerasan jika ditarik ke belakang, telah ada sejak masa kurun niaga (abad ke-16) sampai dengan saat ini. Ide yang digagas oleh mereka yang dituliskan dalam tulisan ini lahir dari pengalaman hidup berjumpa dengan kebudayaan lain, mengalami sendiri kondisi-kondisi kekerasan yang dikuatirkan menimbulkan perilaku intoleransi ataupun sebaliknya ataupun memperbandingkan kondisi di tempat lain yang sempat dikunjungi atau dipelajari lewat membaca buku atau surat kabar. Model belajar seperti ini disebut oleh Benedict Anderson dengan

“Kerangka Perbandingan” (Anderson, 2016: 107-129).

Sejarah bukanlah hanya sebagai kajian masa lalu, tetapi juga merupakan panduan dalam bersikap di masa kini. Onghokham seorang sejarawan dengan mengutip pemikiran dari ahli ilmu politik dari Universitas Cornell Benedict Anderson menggambarkan bahwa Ilmu Sejarah memiliki peran sentral dalam penelitian suatu masyarakat. Dikatakan Onghokham bahwa pentingnya kajian sejarah karena sejarah menggambarkan suatu proses perkembangan dan menjelaskan bagaimana kita sampai pada keadaan saat ini. Ditambahkan lagi oleh Onghokham bahwa sejarah melihat bagaimana masyarakat itu bergerak, berubah dan berkembang dan mempersoalkan dinamika-dinamika di dalamnya. Di Indonesia, ada berbagai macam peristiwa yang tampaknya sudah pernah dialami di masa lalu, tetapi lalu berulang di masa kini. Masalahnya kemudian adalah karena bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah, maka peristiwa-peristiwa yang sama terus berulang. Yang dimaksudkan di sini misalnya peristiwa intoleransi, kekerasan berdasar pada agama, atau kelompok masyarakat tertentu dan lain sebagainya. Sejarah hanya disebutkan ketika seseorang ingin melegitimasi atau membenarkan

kebesaran bangsanya. Padahal, jika belajar dari masa lalu dan ingatan kita tidak pendek, maka tidak perlu untuk mengulangi lagi peristiwa-peristiwa bernuansa intoleransi seperti kekerasan terhadap etnis tertentu atau agama tertentu.

PEMBAHASAN

a. Pengalaman Moderasi Masa Kurun Niaga

Sejarawan asal Australia Anthony Reid, menulis dua jilid buku yang diberi judul *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga*. Jilid pertama berjudul “Tanah di Bawah Angin” (Reid, 2014), sementara jilid kedua berjudul “Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara” (Reid, 2011). Pada jilid kedua ini, Reid dengan gamblang menjelaskan bahwa dalam periode “kurun niaga” yang berlangsung antara tahun 1450-1680, masyarakat di Nusantara telah berjumpa dengan pedagang dari berbagai macam tempat dan kebudayaan di dunia. Masyarakat di Nusantara ini, yang lalu dalam proses perubahan yang panjang berubah menjadi negara bangsa Indonesia. Dalam perjumpaan dengan para pedagang yang diidentifikasi berasal dari Tiongkok, India, Belanda, Portugis, Spanyol, Filipina dan lain sebagainya telah terjadi pertukaran budaya, pertukaran gagasan pengetahuan dan tentu saja upaya saling menerima.

Baik para pendatang, maupun masyarakat setempat, tidaklah bertemu dalam periode yang singkat, yang kadang kala hanya untuk kepentingan tertentu saja, tetapi konteks dan perkembangan teknologi transportasi di masa kurun niaga mengharuskan bahwa seorang yang datang dari tempat tertentu mesti tinggal dalam waktu yang lama untuk menunggu arah angin mendukung proses pelayaran kembali ke tempat asalnya. Tinggal dalam waktu lama mendukung proses untuk pertukaran budaya antara manusia-manusia yang berasal dari berbagai tempat dan masyarakat setempat. Tinggal dalam waktu yang lama ini juga menjadi cikal-bakal pembentukan kota-kota awal di Nusantara yang bertahan sampai dengan saat ini. Reid mencatat lagi bahwa masyarakat Nusantara punya rasa ingin tahu yang unik terhadap para pendatang Eropa dalam hal pengetahuan (Reid, 2011: 55). Tetapi perlu juga untuk dicatat dan dijadikan sebagai bahan refleksi menyangkut kehidupan ber(se)sama bahwa penerimaan dari kedua belah pihak, baik itu para pedagang dari luar Nusantara maupun masyarakat setempat menjadi poin penting untuk diperhatikan. Tanpa penerimaan ini, mustahil untuk terbentuknya misalnya perdagangan atau jaringan perdagangan, mustahil juga terbentuk kota-kota awal di

nusantara yang bertahan sampai dengan saat ini. Itu artinya, bahwa praktek toleransi, telah dikenal oleh masyarakat di Nusantara dalam masa yang disebut “kurun niaga” ini. Bukankah seorang penulis Inggris yang mempelajari kehidupan masyarakat di wilayah koloni Hindia Belanda, pernah menulis dan mengandaikan bahwa kehidupan mestinya berjalan seperti kondisi di pasar, yaitu saat ketika orang bisa keluar-masuk pasar tanpa perlu untuk memperjelas asal-usul berdasar SARA (Furnivall, 2009: 475). Seseorang dapat keluar dan masuk pasar dengan bebas, bahkan dapat bercengkerama dengan pengunjung yang lain tanpa rasa rihuk (malu) karena berasal dari Suku, Agama, Kelas Sosial dan Ras tertentu (bandingkan Siegel, 2021: 473).

b. Kebijakan Kolonial dan Gagasan dari Pemikir Tionghoa

Periode sejarah antara tahun 1799-1942 adalah masa Hindia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam periode ini, untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik berbasis Suku, Agama, Kelas Sosial dan Ras yang sangat kuat terhadap masyarakat di daerah jajahan Hindia (Locher-Scholten, 2013: 224). Kebijakan politik ini memiliki implikasi serius terhadap

kehidupan sosial masyarakat di Hindia baik pada masa kolonial maupun pasca kolonial. Contoh paling serius adalah struktur masyarakat dibagi dalam bentuk seperti piramida yang meletakkan posisi Orang Eropa pada puncak piramida, lalu Timur Asing pada pertengahan piramida dan masyarakat pribumi pada dasar piramida. Dalam konteks perbincangan tentang moderasi beragama, kondisi yang terjadi saat ini sebagian berakar pada masa kolonial tersebut. Kebijakan pemerintah kolonial berbasis SARA ini juga, merusak kondisi keberagaman yang baik sengaja ataupun tanpa sengaja telah terbentuk pada masa pra-kolonial. Tapi, perlu diingat bahwa pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika masyarakat ditekan, mereka selalu bisa bersiasat membaca kondisi, lalu mencari jalan keluar kembali kepada kehidupan normal. Masyarakat Tionghoa adalah kasus yang bisa mendukung pernyataan terakhir.

Dalam piramida struktur masyarakat kolonial yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Tionghoa dimasukkan ke dalam kelompok *Vreemde Oosterlingen* (timur asing) bersama dengan masyarakat India dan masyarakat Arab. Kasus masyarakat Tionghoa menjadi menarik karena dalam kebijakan pemerintah kolonial, mereka tidak diijinkan bergaul dengan orang

Eropa, tetapi juga dibatasi dengan masyarakat pribumi. Padahal masyarakat Tionghoa telah hadir di Nusantara pada era “kurun niaga”, ketika mereka dapat bergaul dengan siapa pun di Nusantara. Mereka dikenal dengan sebutan “sengli” atau pedagang. Tetapi, ketika pemerintah kolonial mulai menduduki Nusantara, yang disebutnya Hindia, orang Tionghoa disebut sebagai “Cina”. Kosakata ini tidak saja berhenti pada istilah yang merujuk pada nama kelompok masyarakat tertentu, tetapi lalu menjadi istilah yang berbau rasial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejak kehadiran orang Tionghoa di Nusantara, mereka telah memperlihatkan bakat berdagang yang unggul dibanding dengan masyarakat lainnya di Nusantara. Para pedagang Tionghoa dapat berhubungan dagang dengan elit-elit dalam satu kelompok masyarakat sama dengan hubungan dagang yang mereka jalin dengan masyarakat pada umumnya, mulai dari tingkat perkotaan sampai pada pelosok desa. Saat pemerintah kolonial Belanda mulai menduduki negeri jajahan Hindia, masyarakat Tionghoa menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diawasi karena peran dalam perdagangan tersebut. Pengawasan ini makin ketat, karena para pejabat pemerintah kolonial takut jika peran ekonomi diambil alih dan dikuasai oleh para

pedagang Tionghoa. Berdasar pada alasan ini, maka pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik untuk tidak mengizinkan masyarakat Tionghoa bergaul dengan orang Eropa dan juga dengan masyarakat pribumi. Bahkan, masyarakat Tionghoa diharuskan bermukim dalam satu pemukiman, dengan dipimpin oleh pejabat dari kalangan masyarakat Tionghoa yang dipilih oleh pemerintah kolonial. Jika ingin bepergian keluar dari pemukiman Tionghoa, maka seseorang diharuskan mengurus surat ijin (pas jalan). Kebijakan ini merupakan akar dari perlakuan diskriminasi yang terus-menerus dialami masyarakat Tionghoa di negara bangsa Indonesia pasca kolonial. Tetapi, dari pengalaman di masa kolonial ini, tidak berarti bahwa masyarakat Tionghoa pasif dan menerima saja perlakuan dari pemerintah kolonial. Kelak, lahir dari kalangan masyarakat Tionghoa orang-orang yang berpikir dan merumuskan gagasan cara hidup ber(se)sama yang berbeda dengan pengalaman mereka selama periode pendudukan kolonial. Orang-orang ini lahir pada awal abad ke-20, tumbuh dan masih mengalami kebijakan berbasis rasial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di tanah jajahan Hindia, mempelajari kehidupan di dunia lain di luar Hindia baik melalui surat

kabar maupun lewat pengalaman langsung mengunjungi tempat-tempat di luar Hindia.

Kwee Thiam Tjing adalah salah seorang yang pemikirannya bisa diingat kembali dalam kaitannya dengan toleransi dan anti kekerasan. Kwee menulis pengalaman hidupnya dalam buku yang berjudul *Indonesia dalem Api dan Bara*. Dalam buku tersebut, Kwee tidak secara terang menulis namanya sebagai penulis, tapi menggunakan nama samaran Tjamboek Berdoeri. Buku ini ditulis dalam bahasa Melayu Pasar yaitu bahasa yang lahir dari perjumpaan berbagai bahasa di masa perniagaan seperti telah diulas pada bagian “kurun niaga”. Karena bahasa ini lahir dan digunakan oleh para pedagang dari berbagai tempat yang berjumpa di Nusantara, maka bahasa ini dinamakan Melayu Pasar.

Kwee dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 9 Februari 1900 (Anderson, 2021: 532). Waktu kelahirannya merupakan masa ketika pemerintah kolonial masih kokoh menduduki tanah jajahan Hindia. Sebagai seorang Tionghoa, Kwee menjadi saksi perlakuan diskriminatif yang dialami masyarakat Tionghoa selama pendudukan kolonial Belanda. Pekerjaannya sebagai seorang wartawan menjadikannya jeli melihat kondisi yang dialami bukan hanya etnis Tionghoa, tetapi dapat melihat

secara umum kelompok bangsa lain yang merasakan kebijakan berbasis SARA yang dipraktekkan sehari-hari oleh pemerintah kolonial. Dalam perjalanan hidupnya, Kwee juga mengenal dan mengetahui perjuangan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang memikirkan dan membayangkan bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan Belanda dan dapat mengatur sendiri bangsanya tanpa politik rasial. Kwee tidak hanya melihat keluar untuk memikirkan gagasan hidup bersama yang lebih baik, tetapi juga mengkritik etnisnya sendiri yaitu etnis Tionghoa yang dipandang eksklusif dan tidak mau berbaur dengan kelompok masyarakat lain di Hindia. Hal ini dilihatnya tidak akan dapat mewujudkan masyarakat yang toleran, tetapi akan tetap seperti yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di Hindia. Kwee tidak dapat dikatakan anti kolonial, karena dia tetap ingin mengambil model kehidupan yang berjalan selama periode pendudukan yang mendukung cara hidup ber(se)sama yang diidam-idamkannya. Terhadap masyarakat pribumi, Kwee juga melayangkan kritiknya kepada massa di masa revolusi yang bertindak sewenang-wenang demi mencapai kemerdekaan. Kwee menyaksikan pembunuhan massal terhadap orang Tionghoa yang dilakukan oleh massa tidak dikenal di Malang dalam periode

revolusi (Siegel, 2010: xv). Menurut Kwee, bukan kemerdekaan seperti ini yang diinginkan baik oleh tokoh nasionalis maupun tokoh-tokoh dari etnis lainnya yang menginginkan kebebasan dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan negara penjajah lain yaitu Jepang.

Pemikir anti diskriminasi lain yang berasal dari etnis Tionghoa bernama Njoo Cheong Seng. Terpaut usia dua tahun lebih muda dari Kwee Thiam Tjing, Njoo juga lahir di era berkuasanya pemerintah kolonial di tanah jajahan Hindia. Njoo besar di dunia pers sama seperti Kwee Thiam Tjing yang mendidiknya untuk dapat lebih jeli membaca kondisi di Hindia pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tapi, berbeda dengan Kwee Thiam Tjing, Njoo Cheong Seng terlibat aktif di dunia Teater, kesenian yang sedang populer di Hindia dan di dunia. Dengan keterlibatannya di dunia teater, Njoo mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke tempat lain di luar Hindia untuk kepentingan pementasan. Claudine Salmon pernah mencatat bahwa kesempatan untuk melihat dunia lain di luar Hindia, membuat orang-orang Tionghoa menyadari bahwa perlakuan diskriminasi hanya diterapkan di Hindia dan tidak di tempat lain seperti Singapura. Di era kurun niaga yang juga telah dibahas, memperlihatkan bahwa

kesempatan berkunjung ke tempat lain memberi kekayaan pengalaman dan pelajaran mengenai kebudayaan tempat lain. Demikianlah adanya, Njoo melihat pemandangan lain di luar Hindia, dan merumuskan gagasan hidup ber(se)sama di Hindia yang ideal. Sekali lagi dengan metode berbeda dengan Kwee Thiam Tjing, Njoo menuliskan gagasan hidup ber(se)sama melalui karya sastra bergenre detektif. Bukan tanpa alasan pemilihan media sastra genre detektif untuk menyampaikan gagasan oleh Njoo Cheong Seng. Sastra merupakan alat menyampaikan pendapat atau gagasan yang tidak frontal atau fulgar, yang tidak akan mudah dilarang oleh pemerintah kolonial yang sedang berkuasa. Pemilihan untuk menyampaikan gagasan lewat karya sastra menjamin bahwa gagasan model kehidupan toleran dapat sampai ke tangan pembaca tanpa disensor. Sementara pemilihan genre detektif lebih pada populernya genre tersebut ketika Njoo sedang aktif menulis.

Dalam serial detektif yang ditulisnya, Njoo menciptakan tokoh rekaan bernama Gagaklodra yang berperan sebagai detektif (Njoo Cheong Seng, 1953). Gagaklodra adalah tokoh yang mengembara di Hindia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Hindia. Sementara itu, dicipta juga tokoh-tokoh

rekaan lainnya yang berbeda di setiap lokasi dengan peran sebagai kriminal. Tokoh kriminal ini tidak lain adalah persoalan diskriminasi yang terjadi di Hindia dan akan ditumpas oleh Gagaklodra. Akhirnya, di bagian akhir cerita, Gagaklodra selalu berhasil menyelesaikan persoalan dengan berbagai metode penyelesaian. Metode penyelesaian yang dimaksud misalnya menyadarkan pelaku kriminal agar tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Metode seperti ini merupakan representasi dari kondisi kolonial yang masih dapat diperbaiki. Dalam model penyelesaian yang paling ekstrem adalah membunuh pelaku kriminal. Hal ini merupakan tanda bahwa persoalan tersebut akan memiliki dampak serius jika tidak diselesaikan dan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa menghapus persoalan tersebut. Jika tidak dihapus, maka persoalan diskriminasi dan kekerasan akan terus-menerus terjadi dan mengancam masyarakat di Hindia. Metode penyelesaian tersebut, dimaksudkan sebagai upaya menghapus hal-hal yang akan melanggengkan kebijakan berbasis rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada intinya, bahwa Gagaklodra adalah tokoh representasi dari dunia ideal yang dibayangkan Njoo Cheong Seng sebagai model kehidupan ber(se)sama di Hindia, ketika kehidupan

berjalan dengan baik tanpa membedakan masyarakat berdasar Suku, Agama, Kelas Sosial dan Ras.

Ketika Njoo Cheong Seng masih bisa berkarya, karya-karya Gagaklodra tetap dapat hadir untuk mengingatkan para pembaca serial tersebut mengenai pentingnya hidup bersama saling bertoleransi dan tidak melakukan kekerasan baik kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Tetapi persoalannya menjadi semakin rumit, karena Njoo Cheong Seng dan bisa ditambahkan lagi misalnya Kwee Thiam Tjing adalah manusia biasa yang memiliki batas usia. Ketika mereka tidak lagi dapat berkarya, maka tidak ada lagi yang menggantikan peran mereka untuk mengingatkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya hidup ber(se)sama dalam masyarakat Indonesia. Celakanya lagi, bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah lupa mengenai gagasan-gagasan yang telah dipikirkan oleh para pendahulu. Anggapan yang paling menarik tentu saja adalah bahwa masyarakat Indonesia tahu betul dan hafal Pancasila, tetapi bersamaan dengan itu, ancaman anti toleransi dan kekerasan kepada kelompok masyarakat tertentu masih sering terjadi. Tokoh pemikir lain yang memikirkan dan memperjuangkan toleransi dan anti kekerasan adalah Pramoedya Ananta Toer.

Seperti melanjutkan pemikiran tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa yang berpandangan sama dengannya, Pramoedya Ananta Toer, sekali lagi mengajar dan mengingatkan masyarakat Indonesia mengenai apa artinya manusia merdeka, seperti yang diulas selanjutnya.

Soekarno dan Gagasan tentang Pancasila

Soekarno merupakan figur penting yang lalu mencetuskan lima dasar Pancasila. Pergulatan pemikirannya yang disampaikan dalam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, berisi lima aspek penting yaitu Ketuhanan, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Kesejahteraan. Buah pemikirannya ini lalu dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dibentuk dua bulan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945.

Yang penting disampaikan di sini, bahwa lima rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, tidaklah lahir begitu saja, tetapi melalui proses pemikiran yang panjang dari sosok Soekarno sendiri. Ada campur aduk antara pengalaman kehidupan, pendidikan, kehidupan berorganisasi dan tentu saja konteks dimana Soekarno lahir dan besar, yaitu ketika Hindia berada di bawah pendudukan Belanda dan Jepang. Kesemua pengalaman hidup tersebut, yang membentuknya untuk kemudian dapat

menjadi seorang pemimpin yang lalu melahirkan dasar negara Pancasila.

Soekarno lahir di tahun 1901, periode-periode awal pergerakan nasional, yang diistilahkan sejarawan Ricklefs sebagai masa ketika langkah-langkah pertama menuju Kebangkitan Nasional (Ricklefs, 2007: 341). Di masa ini, Hindia berada di bawah pendudukan pemerintah kolonial Belanda, dan masa ketika para tokoh pergerakan nasional awal mulai mengenal organisasi-organisasi pergerakan. Periode yang disebut Takashi Shiraishi sebagai “Zaman Bergerak” ini adalah periode munculnya organisasi-organisasi seperti Boedi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, ISDV, Indische Partij dan lain sebagainya. Pada usianya yang ke-16 tahun, Soekarno berpindah ke Surabaya dan tinggal dengan Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam di Surabaya. Olehnya itu, dia bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Agus Salim, Sneevlit, Semaun, Musso, Alimin dan Ki Hadjar Dewantara. Masa ketika Soekarno lahir dan besar adalah periode pendudukan pemerintah kolonial Belanda, yang politiknya terutama didasarkan pada diskriminasi dan segregasi berbasis SARA. Pengalamannya mengalami diskriminasi ketika bersekolah di HBS, telah membentuk cara berpikir anti penjajahan dan

diskriminasi. Hal ini saya kira menjadi salah satu aspek penting untuk rumusan Pancasila yang dicetuskan berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (perikemanusiaan).

Selain Surabaya, Bandung menjadi salah satu tempat perkembangan ide pergerakan. Soekarno tinggal di Kota Bandung ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Di Bandung pula, Soekarno semakin akrab dengan Ki Hadjar Dewantara, dan bertemu dengan Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Ketiga orang ini yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, memperkenalkan Soekarno pada ide-ide nasionalisme Indonesia. Lewat ide nasionalisme ini, Soekarno merumuskan konsep tentang Ke-Indonesia-an yang tidak mengandung komitmen tertentu kepada Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan etnik tertentu. Soekarno juga merumuskan pemikiran yang menyerap ide Hindu, Budha, Islam dan Barat ke dalam satu sintesis yang nantinya menjadi model bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide-ide ini yang berpengaruh untuk Soekarno merumuskan sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan Sila Ketiga Persatuan Indonesia.

Setahun sebelum menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Bandung, Soekarno mendirikan organisasi *Algemeene*

Studieclub (kelompok belajar umum). Tujuan utama organisasi ini adalah kemerdekaan. Pada tahun 1927, Soekarno bersama *Algemeene Studieclub* membentuk Perserikatan Nasional Indonesia yang lalu dirubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928. Keaktifannya dalam dunia politik, lalu mengantarkannya pada penangkapan dirinya tahun 1929. Setahun kemudian pidato pembelaannya ditolak di depan pengadilan dan Soekarno dijebloskan ke dalam penjara selama empat tahun di Penjara Sukamiskin, Bandung. Hukuman penjaranya dikurangi dan kemudian bisa bebas pada tahun 1931. Aktifitas politiknya kembali membawanya pada penangkapan di tahun 1933, dan mengantarkannya pada pembuangan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini yang lalu menjadi tempat Soekarno merumuskan Pancasila. Sebagaimana dicatat Majalah *Historia*, bahwa perenungan Soekarno di bawah pohon Sukun membuahkan butir-butir gagasan yang lalu dikenal dengan Pancasila. Perenungan ini ditujukan untuk mencari jawab dari pertanyaan Pater Huijtinck SVD, yang memberinya pertanyaan Bagaimana kamu menempatkan ibumu yang Hindu, orang Budha dan Katolik di tanah yang kebanyakan beragama Islam?

Memang penting untuk dicatat bahwa pembuangan menjadi salah satu “keberuntungan” bagi Soekarno dalam perjalanan hidupnya. Sebelum pembuangannya ke Ende dan berlanjut ke Bengkulu, Soekarno berada dalam kelompok elit dan hanya berdiskusi dengan kelompok elit. Ketika di Ende, sebagaimana dicatat dalam Biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno mengatakan bahwa Ende memberinya ruang untuk bisa berbicara dengan rakyat kebanyakan yang bukan elit (Adams, 2019: 156). Soekarno berada di pembuangan sampai kemudian dibebaskan ketika Jepang telah berkuasa selama tiga bulan di Hindia. Kepentingan untuk mobilisasi dan pentingnya pengaruh elit yang dapat mempengaruhi massa, mendorong angkatan darat ke-16 meminta Soekarno dibebaskan. Dengan segera Soekarno berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang, tetapi dengan tetap memelihara keinginan untuk membebaskan masyarakat Indonesia untuk merdeka (Siregar, 2018: 63). Soekarno jelas melihat lagi kesengsaraan masyarakat Indonesia di bawah pendudukan rejim Jepang, potret yang nyaris sama dengan periode pendudukan kolonial Belanda. Selama periode pendudukan Jepang, Soekarno kembali mengambil posisi penting pada satu sisi

sebagai kolaborator Jepang dan sisi lain untuk mewujudkan keinginannya memerdekakan masyarakat Indonesia. Soekarno mendapat keistimewaan untuk dapat mengunjungi beberapa tempat seperti kunjungan perdana ke luar negeri tepatnya ke Tokyo. Menjelang akhir periode pendudukan Jepang, Soekarno berkunjung ke Makassar (April 1945). Sebulan sebelum kunjungan tersebut, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Sidang pertama BPUPKI lah yang menjadi ajang perdana Soekarno membacakan doktrin Pancasila, hasil perenungan dalam proses panjang kehidupan, pengalaman dan pendidikan. Penting untuk diingat bahwa pidatonya mengenai Pancasila berjarak waktu dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan.

Tidak seperti tokoh pergerakan lain semisal Hatta, Ki Hadjar Dewantara, ataupun Sjahrir. Soekarno tidak pernah menempuh pendidikan atau pergi ke luar negeri sebelum tahun 1943. Tetapi, Soekarno bisa mengembangkan gagasan dan pengetahuannya mengenai pemikiran dari orang-orang luar Hindia dari membaca. Dia membaca tulisan Mahatma Gandhi, Karl Marx dan pemikir lain dari membaca. Kosmopolitan (menjadi warga dunia) menurut Ben Anderson tidak perlu

berkunjung ke berbagai bandara-bandara di dunia, tetapi imajinasi dengan membaca menjadi salah satu cara menjadi kosmopolit. Akhirnya, sebagaimana dipahami bersama bahwa Pancasila sampai dengan saat ini masih menjadi rujukan penting bagi masyarakat (di) Indonesia untuk hidup ber(se)sama. Tidak ada yang tidak tahu keberadaan Pancasila dan isi kelima sila Pancasila, yang ada adalah orang yang tahu tetapi lupa bahwa ada Pancasila. Tidak mengherankan kemudian, jika Buya Syafii Maarif resah dan mengatakan bahwa “Sila yang paling sial dari Pancasila adalah sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

c. Pramoedya Ananta Toer:

Memperjuangkan Moderasi Lewat Sastra

Pramoedya Ananta Toer adalah seorang sastrawan yang gigih memperjuangkan persamaan perlakuan terhadap manusia tanpa dibeda-bedakan berdasar SARA. Sama dengan Njoo Cheong Seng, Pramoedya menuliskan gagasannya lewat karya sastra. Selama aktif menulis, Pramoedya telah dimusuhi oleh penguasa karena dalam pandangannya sejak negara bangsa Indonesia merdeka, tidak ada perubahan substansial terkait dengan

perlakuan terhadap masyarakat (di) Indonesia. Pramoedya paham betul diskriminasi yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dipelajarinya lewat arsip-arsip peninggalan periode tersebut dan yang dialaminya sejak lahir di tahun 1926 sampai berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di tahun 1942. Pramoedya menulis roman empat jilid yang dikenal dengan sebutan tetralogy, yang mengulas tentang periode awal abad ke-20, masa yang dikenal dengan periode pergerakan nasional atau yang diistilahkan Takashi Shiraishi sebagai “zaman bergerak”. Empat jilid tulisannya tersebut berjudul *Bumi Manusia* (2006), *Anak Semua Bangsa* (2007), *Jejak Langkah* (2007), dan *Rumah Kaca* (2006). Dalam karya tetraloginya tersebut, Pramoedya lewat penceritaan kembali kisah hidup Tirtoadisuryo (pendiri surat kabar *Medan Prijaji*) yang direpresentasikan dalam tokoh Minke, menggambarkan dengan jelas struktur masyarakat kolonial dan penerapan struktur tersebut dengan ketat. Struktur kolonial ini direpresentasikan lewat tokoh-tokoh dalam tetralogi Buru. Tokoh Ontosoroh misalnya yang dalam tetralogy Buru merupakan “Nyai” seorang laki-laki Belanda bernama Herman Mellema. Herman Mellema ini lalu meninggalkan Ontosoroh.

Sendirian mengurus dua orang anaknya, Ontosoroh juga membangun perusahaan perkebunan yang ditinggalkan suaminya tersebut. Tetapi, ketika perusahaan tersebut berkembang, pengadilan mengambil alih perusahaan tersebut karena status Ontosoroh yang bukan istri resmi dan bukan Belanda. Bukan hanya mengambil perusahaan, tetapi pengadilan kolonial yang rasialis juga mengambil Annelies Mellema putrinya untuk mengikuti keluarga suaminya di Belanda.

Lewat tokoh Minke Pramoedya Ananta Toer juga meletakkannya dalam dua posisi. Pertama sebagai orang yang mengalami sendiri periode kolonial dan sejak bersekolah di *Hogere Burger School* (HBS) telah mengalami perlakuan diskriminatif dari para guru dan teman sekolahnya yang berkebangsaan Belanda. Tetapi bersama dengan Ontosoroh, Minke berjuang melawan diskriminasi yang diterapkan kepada mereka sebagai orang pribumi. Tidak hanya menceritakan nasib kelompok pribumi di masa kolonial, Pramoedya juga melibatkan etnis yang lain seperti etnis Tionghoa, Jepang dan kelompok masyarakat lain di Hindia. Minke diposisikan juga sebagai tokoh yang selama hidupnya memperjuangkan semangat anti diskriminasi dan anti kolonialis. Perlu diingat bahwa pengalaman sejarah telah

menunjukkan bahwa kolonialisme selalu berkait dengan kekerasan.

Pramoedya Ananta Toer terlibat aktif dalam masa revolusi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebelum revolusi meletus, tampaknya memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengatur sendiri negara bangsa yang baru berdiri tersebut, setidaknya tidak lagi mengulangi diskriminasi berdasar SARA yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial. Tetapi Pramoedya seperti Kwee Thiam Tjing yang terlibat dalam masa revolusi melihat bahwa harapan untuk merdeka sepenuhnya bagai jauh panggang dari api. Periode revolusi yang dipotretnya dalam karya-karya sastra seperti *Keluarga Gerilya* (1955), *Percikan Revolusi Subuh* (2001), *Larasati* (2018) atau roman *Midah Si Manis Bergigi Emas* (2010) mempertontonkan bahwa negara bangsa Indonesia yang baru berdiri tersebut, masih berperilaku seperti masa sebelum merdeka, hanya yang berbeda bahwa pelakunya bukan lagi orang-orang Belanda tetapi elit-elit Indonesia sendiri. Pramoedya masih memelihara harapan bahwa lambat laun atau setelah revolusi, kondisi akan berubah. Tetapi keadaan memperlihatkan pandangan yang berbeda. Pramoedya masih terus-menerus aktif untuk menulis dan mengingatkan masyarakat Indonesia

mengenai cita-cita setelah merdeka yaitu membentuk bangsa yang setara (Mrazek, 2006: 278-279). Tetapi, pasca tragedi berdarah 30 September 1965, pemerintah Orde Baru yang berkuasa menemukan cara untuk membungkam Pramoedya, dengan menangkap dan memenjarakan Pramoedya serta menempatkannya di kamp konsentrasi pulau Buru tanpa melalui proses pengadilan. Ketakutan penguasa Orde Baru akan pengaruh dari tulisan-tulisan Pramoedya terhadap massa rakyat menjadi alasan utama penangkapan dan penahanan tersebut. Beruntung bahwa banyak anak muda-anak muda Indonesia yang masih bisa mengakses karya-karya Pramoedya Ananta Toer sampai dengan saat ini. Harapannya tentu saja, buah pemikiran Pramoedya untuk terbentuknya masyarakat yang merdeka tanpa takut dibeda-bedakan berdasar SARA masih terpelihara dan dapat menjadi pegangan untuk hidup ber(se)sama di negara bangsa Indonesia saat ini.

SIMPULAN

Dua indikator moderasi yaitu toleransi dan anti kekerasan bukanlah istilah baru dalam kehidupan masyarakat (di) Indonesia. Sejak masa yang disebut Anthony Reid sebagai “kurun niaga” istilah ini telah dipraktikkan dalam pertemuan secara fisik

antara masyarakat nusantara dengan manusia-manusia lain dari berbagai belahan dunia. Pelajaran hidup bertoleransi dan anti kekerasan telah juga dirumuskan kembali oleh anak bangsa Indonesia dari berbagai etnis berkat pengalaman mereka mengalami sendiri praktek anti toleransi yang mereka alami pada periode kolonial. Bukannya mencontoh pemerintah kolonial, anak-anak bangsa Indonesia justru belajar, berpikir lalu menggagas model kehidupan yang berbeda dengan kehidupan masa kolonial tersebut, dengan alasan bahwa model kehidupan di masa kolonial bukanlah model kehidupan ideal. Kehidupan di masa kolonial Belanda justru mengancam masyarakat Indonesia yang beragam tersebut.

Sebenarnya, pengalaman sejarah masyarakat Indonesia, telah cukup untuk menjadi model membangun bangsa yang toleran dan tidak berdasar pada kekerasan jika saja bisa belajar dari sejarah. Kata bijak yang menyebut hanya keledai yang dapat jatuh pada lubang yang sama mestinya dijadikan bahan renungan bahwa negara bangsa Indonesia bukanlah keledai, tetapi masyarakat yang dapat belajar dari sejarah. Persoalannya sekarang adalah bahwa ketika Kementerian Agama mendengungkan istilah Moderasi Beragama, pada saat itulah kita mengingat kembali bahwa kita belum

seungguhnya belajar dari sejarah terutama hal-hal menyangkut toleransi dan anti kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. (2019). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (edisi revisi)*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno kerja sama dengan PT. Media Pressindo.
- Anderson, Benedict. (2016). *Hidup di Luar Tempurung*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Anderson, Benedict. R.O’G. (2021). “Bahasa Tanpa Nama”, dalam Henri Chambert-Loir (penyunting). *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia: Jilid II*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Locher-Scholten, Elsbeth. (2013). “Pakaian Musim Panas dan Makanan Kaleng: Perempuan Eropa dan Gaya Hidup Barat di Hindia Tahun 1900-1942”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.). *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mrazek, Rudolf. (2006). *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Seng, Njoo Cheong. (1953). *22 Tahun dengan Gagaklodra*. Malang: Prana Agency Service.
- Siegel, (2010). “Kisah Dua Buku, Atau Membaca Tjamboek Berdoeri”, dalam Arief W. Djati dan Ben Anderson (ed.). *Menjadi Tjamboek Berdoeri: Memoar Kwee Thiam Tjing*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Siegel, Jim. (2021). “Berbahasa”, dalam Henri Chambert-Loir (penyunting). *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia: Jilid II*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Siregar, Aminuddin. T.H. (2018). ”Menemukan Identitas Melalui Propaganda Seni Rupa Indonesia di Zaman Pendudukan Jepang”, dalam Taufik Abdullah dan Triana Wulandari (editor). *Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 59-88.
- Toer, Pramoedya Ananta. (1955). *Keluarga Gerilja*. Djakarta: PT. Pembangunan.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2001). *Percikan Revolusi Subuh*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2006). *Bumi Manusia*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2006). *Rumah Kaca*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Toer, Pramoedya Ananta. (2007). *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Toer, Pramoedya Ananta. (2007). *Jejak Langkah*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Toer, Pramoedya Ananta. (2010). *Midah: Si Manis Bergigi Emas*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Toer, Pramoedya Ananta. (2018). *Larasati*. Jakarta: Lentera Dipantara.